

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kajian ini mendasari variabel yang diteliti, serta hasil penelitian sebelumnya yang relevan dan mendukung penggunaan teori tersebut. Ulasan ini juga diarahkan pada keterkaitan dengan permasalahan penelitian yang telah ditentukan. Selanjutnya, dipaparkan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Evaluasi Program Satu Milyar Satu Desa di Kabupaten Bogor. Adapun penelitian-penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

2.1 Penelitian terdahulu

Program SAMISADE terbukti relevan dengan arah kebijakan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa, dan pelaksanaannya secara keseluruhan sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Analisis penelitian oleh Mimin & Saefullah (2023) menunjukkan bahwa pelaksanaan program konsisten dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2020, khususnya terkait pemberdayaan masyarakat, serta berhasil meningkatkan partisipasi aktif warga desa dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pembangunan desa dan implementasi SAMISADE. Latar belakangnya, Program Satu Milyar Satu Desa (SAMISADE) diperkenalkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor pada 2020 dengan pendanaan dari APBD Kabupaten Bogor, bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan aspek sosial dan ekonomi.

Penelitian kedua dilakukan oleh Febrianti et al. (2023) meneliti pengelolaan program Samisade dengan fokus pada penerapan tiga prinsip utama, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip tersebut di Desa Pasir Angin berjalan cukup baik, terlihat dari pelaksanaan indikator akuntabilitas yang mengikuti mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan, serta tanggung jawab penuh Kepala Desa sebagai pelaksana utama program. Dari sisi transparansi, pengelolaan Samisade dilaksanakan secara terbuka sehingga

dapat dipantau oleh masyarakat. Adapun faktor pendukung keberhasilan program ini antara lain kualitas sarana prasarana, SDM, komunikasi, dan dukungan masyarakat. Namun demikian, terdapat kendala yang dihadapi, salah satunya kondisi cuaca, seperti hujan, yang menyebabkan keterlambatan dalam pembangunan infrastruktur jalan..

Penelitian ketiga dilakukan oleh Oktapriadi & Rahman (2023) meneliti “Penerapan Pengelolaan SAMISADE di Desa Pasir Angin Kecamatan Cileungsi”. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas sudah cukup diterapkan, namun partisipasi masyarakat belum optimal karena minimnya sosialisasi dari pemerintah desa.

Penelitian keempat oleh Wulandari & Al-Amin (2025) menyoroti rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dalam Program Samisade, yang disebabkan oleh distribusi infrastruktur teknologi yang tidak merata serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa, dan merekomendasikan penguatan supervisi multi-level serta pendampingan teknis berbasis ahli.

Selanjutnya penelitian kelima diadopsi dari penelitian Oktapriadi & Rahman (2023) menguraikan prinsip good governance yang berfungsi membangun pemerintahan yang transparan dan akuntabel demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Konsep good governance dipandang sebagai strategi penting untuk meningkatkan kinerja pemerintahan, terutama dalam aspek pengelolaan keuangan desa. Salah satu implementasinya terlihat pada program SAMISADE.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Firlis et al. (2024) Evaluasi program dilakukan dengan meninjau empat komponen utama. Pertama, dari sisi konteks, pelaksanaan program telah sejalan dengan pembangunan. Kedua, pada aspek input, pengelolaan anggaran desa dilakukan secara efisien dengan menunjukkan keterbukaan dalam laporan keuangan serta adanya komunikasi yang transparan bersama masyarakat. Ketiga, dalam hal proses, seluruh tahapan pelaksanaan program dijalankan sesuai standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku. Keempat, terkait produk,

pembangunan infrastruktur yang dihasilkan didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat melalui mekanisme partisipatif, meliputi survei lapangan, forum diskusi. Selain itu, telah dilakukan sejumlah langkah perbaikan untuk menjamin keberlanjutan serta peningkatan mutu program ke depan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan SAMISADE tidak hanya memenuhi tujuan awal, tetapi juga mendukung pengambilan keputusan dan keberlangsungan program secara berkesinambungan.

Michel et al. (2024) melakukan evaluasi terhadap Program Samisade di Kabupaten Bogor dan menemukan bahwa intervensi berbasis dana satu miliar per desa telah berkontribusi pada peningkatan infrastruktur serta pertumbuhan sosial-ekonomi lokal, meskipun tantangan terkait monitoring dan partisipasi masyarakat tetap terjadi.

Dalam studi kuantitatif oleh Pertiwi et al. (2024) ditemukan bahwa tingginya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Samisade memiliki kontribusi signifikan terhadap pemerataan kesejahteraan antar-desa di Kabupaten Bogor, meskipun ketimpangan wilayah masih menjadi isu utama.

Menurut Rifa et al. (2024) pelaksanaan Program Samisade di Desa Megamendung telah berhasil meningkatkan infrastruktur jalan desa. Evaluasi dengan pendekatan Edward III menunjukkan bahwa komunikasi yang baik, sumber daya memadai, dan struktur birokrasi yang efektif menjadi kunci keberhasilan implementasi.

Menurut Michel (2024) menulis tesis berjudul Evaluasi Program SAMISADE dan Jabar Caang dalam Peningkatan Infrastruktur Desa (Kecamatan Jasinga, 2020–2023). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Program SAMISADE berhasil meningkatkan akses infrastruktur, namun tantangan transparansi dan keterlibatan masyarakat masih perlu ditingkatkan.

2.2 Kerangka Teori

Kerangka teori memiliki peran penting sebagai landasan dalam suatu penelitian, sebab di dalamnya dijelaskan berbagai Kerangka teori berkaitan dengan variabel-variabel yang menjadi fokus penelitian. Menurut Sugiyono

dalam (Wekke, 2019), kerangka teori berperan sebagai sarana yang menjelaskan variabel atau masalah utama yang diteliti. Teori-teori yang disajikan kemudian berfungsi sebagai landasan dalam proses analisis dan pembahasan. Dengan demikian, penyusunan kerangka teori dimaksudkan untuk memperkuat validitas dan keyakinan terhadap temuan penelitian yang dilakukan.

2.2.1 Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan bentuk tindakan ikut campur negara untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik mencakup semua keputusan pemerintah dalam menghadapi masalah yang muncul di masyarakat, baik berupa tindakan nyata maupun keputusan untuk tidak bertindak. Dalam konteks ini, Thomas R. Dye dalam Ramla Inaku et al. (2025) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “Whatever Governments choose to do or not to do”. Dalam konteks kebijakan SAMISADE, pemerintah kabupaten Bogor secara aktif memilih untuk melakukan tindakan intervensi pembangunan desa dengan memberikan alokasi dana satu miliar rupiah per desa per tahun. Ini merupakan keputusan aktif pemerintah daerah yang mencerminkan wujud nyata dari kebijakan publik dalam menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur pedesaan.

Sementara itu, proses kebijakan publik dapat dianalisis melalui pendekatan tahapan kebijakan (*policy cycle*) yang dikembangkan oleh James E. Anderson dalam Setyawan & Ra'is (2025). Ia membagi proses kebijakan menjadi lima tahap: agenda setting (penentuan agenda), (*formulation*) perumusan kebijakan, (*adoption*) pengesahan, (*implementation*) pelaksanaan, dan (*evaluation*) evaluasi. Tahapan ini dapat digunakan untuk menelaah bagaimana SAMISADE bermula dari isu rendahnya pembangunan

infrastruktur desa, lalu dibawa ke meja kebijakan, dirumuskan dalam bentuk peraturan Bupati, dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), hingga akhirnya dievaluasi setiap tahun melalui laporan realisasi fisik dan keuangan.

Lebih lanjut, Harold D. Lasswell dalam Ravyansah (2022) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah proses yang bersifat interaksi dan integritas dan bertujuan untuk memberikan solusi rasional terhadap masalah publik. Mengembangkan tujuh tahapan analisis kebijakan, yakni: *intelligence*, *promotion*, *prescription*, *invocation*, *application*, *termination*, dan *appraisal*. Jika dikaitkan dengan SAMISADE, proses pengumpulan informasi terjadi saat pemerintah mengidentifikasi ketimpangan pembangunan antar wilayah; promosi dilakukan melalui kampanye kepala daerah; rekomendasi melalui penepatan teknis alokasi dana; permohonan saat kebijakan diberlakukan; dan penerapan dijalankan oleh pemerintah desa. Evaluasi atau penilaian dilakukan melalui pelaporan berkala.

Dari teori yang dikembangkan oleh David Easton, kebijakan publik dipandang sebagai *output* dari system politik yang menerima “input” berupa tuntutan dan dukungan masyarakat (Sofianus et al., 2023). Dalam hal ini, kebijakan SAMISADE muncul sebagai respon dari pemerintah kabupaten Bogor terhadap tuntutan masyarakat desa akan pembangunan yang merata. Aspirasi masyarakat dan tokoh desa merupakan input politik yang masuk ke dalam system pemerintahan. Kemudian, sebagai output nya, muncul kebijakan SAMISADE yang diwujudkan melalui regulasi dan distribusi anggaran desa. Proses ini menggambarkan

bagaimana system politik bekerja secara responsive terhadap kebutuhan masyarakat.

Teori kebijakan menurut William N. Dunn menekankan bahwa kebijakan publik harus dilihat sebagai proses pemecahan masalah yang sistematis (Meirgin Yektris Killa et al., 2021) Dalam studi ini, kebijakan SAMISADE dapat dianalisis dari bagaimana permasalahan pembangunan desa dirumuskan oleh pemerintah, bagaimana proyeksi keberhasilan dibuat dalam bentuk target, serta bagaimana pemantauan dilakukan melalui laporan pelaksanaan di tingkat desa. Evaluasi terhadap efektivitas kebijakan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa tujuan awal seperti pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa benar – benar tercapai.

Menurut Edi & Suharto dalam (MAUNDE et al., 2021) Kebijakan publik dapat dipahami melalui tiga dimensi yang saling berhubungan. Dimensi pertama adalah sebagai tujuan (objective), yakni gambaran mengenai hasil akhir yang hendak dicapai. Dimensi kedua menempatkan kebijakan publik adalah pilihan yang sah secara hukum, yaitu berbagai langkah yang dijalankan sesuai ketentuan serta regulasi yang berlaku. Ketiga, sebagai hipotesis (hypothesis), yaitu asumsi atau prediksi mengenai efek atau hasil dari tindakan tersebut.

1. Kebijakan publik sebagai tujuan

Hasil yang diharapkan oleh warga yang diwakili pemerintah menjadi fokus utama dari kebijakan publik. Oleh karena itu, kebijakan publik dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan yang dirancang oleh pemerintah untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Keputusan tersebut bersifat mengikat, khususnya bagi

aparatur negara, untuk menjalankan instruksi yang telah ditetapkan.

2. Kebijakan publik sebagai hipotesis

Setiap kebijakan dirumuskan dengan bertumpu pada teori, model, ataupun hipotesis yang menjelaskan hubungan sebab-akibat. Di dalamnya terkandung asumsi mengenai perilaku manusia serta mekanisme insentif yang dirancang untuk mendorong individu agar bertindak sesuai arah yang diharapkan.

Selain itu, kebijakan juga menyertakan disinsentif yang mencegah orang melakukan hal-hal tertentu. Kebijakan harus dapat menggabungkan prediksi tentang pencapaian hasil yang diinginkan dengan mekanisme untuk menangani kemungkinan kegagalan. Terkait dengan definisi-definisi tersebut, dapat ditarik Terdapat sejumlah karakteristik penting dalam mendefinisikan kebijakan publik. Kebijakan publik memiliki beberapa karakteristik utama. Salah satunya, kebijakan ini mencerminkan tindakan nyata pemerintah, seperti pengaturan perdagangan, pengendalian inflasi, atau penyediaan fasilitas perumahan, sehingga bukan sekadar rencana atau janji semata. Selain itu, kebijakan publik tidak berupa perilaku acak atau tidak konsisten, melainkan difokuskan pada tindakan yang memiliki tujuan tertentu.

2.3 Tahapan kebijakan

Untuk mempermudah kajian dan pemahaman, sejumlah ilmuwan politik yang menekuni bidang kebijakan publik kemudian membaginya ke dalam beberapa tahapan. Meskipun demikian, pembagian tersebut tidak selalu sama, sebab setiap ahli dapat menyusun urutannya dengan cara berbeda. Menurut William Dunn, sebagaimana dikutip dalam Meirgin Yektris Killa et al. (2021), tahapan kebijakan publik dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.3.1 Tahap penyusunan agenda

Isu-isu yang diajukan ke dalam agenda publik berasal dari para pejabat yang terpilih maupun yang ditunjuk. Namun, sebelum masuk ke dalam agenda kebijakan, setiap isu harus melalui proses persaingan untuk mendapatkan perhatian. Pada akhirnya, hanya sebagian isu yang berhasil ditetapkan sebagai prioritas para pembuat kebijakan. Dalam tahap ini, terdapat kemungkinan bahwa sejumlah isu tidak mendapatkan pembahasan sama sekali, sementara isu lain justru menjadi sorotan utama. Selain itu, ada pula isu-isu yang pembahasannya ditunda untuk jangka waktu tertentu karena berbagai pertimbangan.

2.3.2 Tahap formulasi kebijakan

Pada fase ini, isu didefinisikan secara jelas untuk kemudian dicari alternatif penyelesaiannya. Berbagai opsi kebijakan ditawarkan sebagai kemungkinan solusi sebagai langkah yang paling tepat. Dalam proses perumusan kebijakan ini, berbagai aktor terlibat aktif, berupaya mengajukan dan mempertahankan usulan solusi yang dianggap paling efektif guna menjawab permasalahan yang ada.

2.3.3 Tahap adopsi kebijakan

Terdapat satu opsi yang dipilih untuk diadopsi dari sekian banyak alternatif kebijakan. Keputusan ini biasanya ditetapkan melalui dukungan mayoritas di lembaga legislatif, hasil kesepakatan antar pimpinan instansi terkait, atau melalui putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan.

2.3.4 Tahap implementasi kebijakan

Sebuah kebijakan tidak akan lebih dari sekadar dokumen formal para elit jika tidak diwujudkan melalui proses implementasi oleh lembaga administratif maupun

aparatus pemerintah di tingkat bawah. Setelah ditetapkan, kebijakan perlu dilaksanakan oleh unit-unit pelaksana yang bertanggung jawab mengalokasikan sumber daya. Pada fase implementasi inilah sering muncul dinamika kepentingan, di mana sebagian kebijakan memperoleh dukungan dari pelaksana, sedangkan yang lain justru menghadapi hambatan berupa penolakan atau resistensi.

2.3.5 Tahap evaluasi kebijakan

Evaluasi dilakukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai, khususnya dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Proses evaluasi dilakukan dengan menggunakan ukuran maupun kriteria tertentu sebagai tolok ukur, sehingga dapat diketahui apakah kebijakan memberikan dampak atau tidak.

2.4 Implementasi Kebijakan

Tahap implementasi sangat penting dalam siklus kebijakan publik karena menentukan sejauh mana kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi melibatkan tindakan individu atau kelompok dari pemerintah maupun swasta untuk menjalankan keputusan kebijakan, seperti undang-undang, peraturan, atau keputusan eksekutif.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Sujarwani (2016) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang menggambarkan apa yang benar-benar terjadi setelah sebuah program dirumuskan atau dijalankan. Proses ini mencakup berbagai aktivitas dan kejadian yang muncul pasca disahkannya kebijakan publik, termasuk bagaimana kebijakan tersebut dikelola serta bagaimana kebijakan itu menghasilkan dampak langsung pada masyarakat maupun peristiwa terkait.

Selain dipahami sebagai sebuah definisi, implementasi kebijakan juga dapat ditinjau dalam tiga perspektif, yakni sebagai proses, sebagai keluaran (output), dan sebagai hasil akhir (outcome). Hal ini bertujuan mewujudkan regulasi atau keputusan pemerintah yang sebelumnya telah dirumuskan.

Secara umum, implementasi kebijakan mencakup beberapa aspek, yaitu Tahap pelaksanaan keputusan dasar, yang disebut implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip oleh Leo Agustino dalam Yuhana & Kartini (2020), mencakup pelaksanaan keputusan yang biasanya berbentuk undang-undang, namun juga dapat berupa perintah penting, keputusan eksekutif, atau putusan dari lembaga peradilan. Secara umum, keputusan tersebut meliputi identifikasi masalah yang harus diselesaikan, penetapan tujuan yang ingin dicapai, serta perumusan metode atau cara untuk mengatur dan menjalankan proses pelaksanaannya.

2.5 Evaluasi Kebijakan

2.5.1 Pengertian Kebijakan

Mazmanian dan Sabatier, yang dikutip oleh Leo Agustino dalam Yuhana & Kartini (2020), menjelaskan bahwa implementasi Tahap pelaksanaan keputusan dasar dikenal sebagai implementasi kebijakan. Keputusan yang dijalankan pada tahap ini biasanya berbentuk undang-undang, namun juga dapat berupa perintah penting, keputusan eksekutif, atau putusan dari lembaga peradilan. Secara umum, keputusan tersebut meliputi beberapa aspek, yaitu identifikasi masalah yang harus diselesaikan, penetapan tujuan yang ingin dicapai, serta perumusan metode atau cara untuk mengatur dan menjalankan proses implementasinya. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan bentuk keputusan strategis pemerintah dalam mengatur masyarakat dan merespon berbagai permasalahan publik.

Pendekatan ini memberikan ruang analisis yang luas dalam memahami kebijakan. Kebijakan publik dianggap sebagai hasil dari proses politik, di mana berbagai kepentingan dan kekuatan yang ada di masyarakat saling berinteraksi dan mempengaruhi keputusan pemerintah.

Oleh karena itu, dalam membuat suatu kebijakan, pemerintah tidak hanya bertindak secara rasional atau administratif semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek politik, ekonomi, sosial, dan bahkan tekanan dari kelompok-kelompok kepentingan (interest groups). Pandangan ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak lahir dalam ruang hampa, melainkan merupakan produk dari dinamika politik dan kompromi berbagai aktor.

Selain itu, kebijakan publik terdiri dari berbagai jenis, seperti kebijakan distributif, regulatif, dan redistributif (Yuhana & Kartini, 2020). Kebijakan distributif bertujuan untuk mendistribusikan sumber daya kepada masyarakat, seperti bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur desa, yang dapat dikaitkan dengan program SAMISADE di Kabupaten Bogor. Kebijakan regulatif ditujukan untuk mengatur perilaku masyarakat atau institusi, seperti peraturan daerah atau undang-undang, sedangkan kebijakan redistributif berfungsi untuk mengalihkan sumber daya dari kelompok tertentu ke kelompok lain, misalnya melalui program subsidi atau pajak progresif. Klasifikasi ini membantu dalam memahami orientasi kebijakan pemerintah terhadap masyarakat.

Thomas R. Dye memberikan kontribusi besar dalam mengkaji efektivitas kebijakan publik, termasuk dalam evaluasi pelaksanaannya. Melalui definisi yang ringkas namun luas tersebut, ditekankan bahwa kebijakan publik adalah pilihan, dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan administratif kepada masyarakat. Dalam ini, pendekatan dapat digunakan untuk menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar merupakan pilihan yang tepat untuk menjawab kebutuhan pembangunan desa, atau

hanya menjadi bagian dari kebijakan simbolik tanpa dampak substantif.

2.5.2 Evaluasi Kebijakan

Thomas R. Dye dalam Sarury et al. (2025) menekankan bahwa evaluasi tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga mencakup analisis terhadap proses pelaksanaan serta dampak kebijakan terhadap masyarakat. Ia menegaskan bahwa evaluasi kebijakan memiliki fungsi utama untuk menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan yang diterapkan. Efektivitas berkaitan dengan kemampuan kebijakan dalam merealisasikan tujuan yang telah dirumuskan, sedangkan efisiensi menekankan pada sejauh mana tujuan tersebut dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya secara optimal, sedangkan efisiensi berkaitan dengan seberapa optimal penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Selain itu, evaluasi juga mencakup penilaian terhadap kecukupan (*adequacy*) solusi yang diberikan serta keadilan (*equity*) distribusi manfaat bagi masyarakat.

Proses evaluasi kebijakan melibatkan beberapa langkah utama, mulai dari identifikasi tujuan kebijakan, pengumpulan data dan informasi terkait pelaksanaan, pengukuran hasil serta analisis terhadap pencapaian tujuan. Melalui proses ini, evaluasi dapat memberikan gambaran objektif mengenai keberhasilan maupun kekurangan dari suatu kebijakan. Dengan demikian, hasil evaluasi digunakan untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan kebijakan di masa mendatang.

Menurut N. A. Febrianti et al. (2022) , evaluasi kebijakan merupakan suatu upaya yang sistematis dan komprehensif untuk menilai efektivitas kebijakan. Fungsi evaluasi tidak terbatas pada pengawasan semata, tetapi juga

menjadi dasar penting dalam memberikan rekomendasi, baik untuk perbaikan, keberlanjutan, maupun penghentian suatu kebijakan. Dengan penerapan evaluasi yang matang, kebijakan publik diharapkan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas.

2.5.3 Program Samisade

Program Samisade di Kabupaten Bogor adalah salah satu upaya dalam membangun desa yang merupakan program unggulan dari Kementerian Desa. Program Samisade ini berpedoman pada yang mulanya Peraturan Bupati Bogor Nomor 83 dirubah menjadi Peraturan Bupati Bogor Nomor 100 Tahun 2021 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa (Rifa et al., 2024). Program ini diluncurkan oleh Bupati Bogor Ade Yasin dan Iwan Setiawan, diharapkan dapat membawa kemajuan dan keberhasilan yang signifikan. Dimulai sejak tahun 2019 dan direncanakan terealisasi pada tahun 2021, bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat mengingat mayoritas penduduk desa di Kabupaten Bogor bergantung pada pertanian, perkebunan, dan pariwisata, serta menghadapi kesulitan dalam mengakses fasilitas seperti pusat pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan. Program Samisade dirancang untuk menciptakan sinergi antara pembangunan desa dan daerah, meningkatkan infrastruktur desa, mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, dan meningkatkan mobilisasi serta transportasi sumber daya. Bupati Bogor mengeluarkan peraturan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan desa dan menciptakan fasilitas infrastruktur yang menghubungkan berbagai bagian desa.

Menurut undang-undang desa, pembangunan desa dan pengembangan desa adalah dua aspek kunci dalam

masalah pembangunan desa. Suatu desa dianggap berkembang jika mampu memanfaatkan potensi yang dimilikinya dan bekerja sama dengan pemerintah daerah serta masyarakat setempat. Kewenangan ini melibatkan berbagai inisiatif yang dapat meningkatkan ekonomi lokal, di mana desa menentukan kebutuhan dan mencari solusi untuk memenuhinya. Desa berperan sebagai subjek pembangunan, bukan hanya objek. Pembangunan desa merujuk pada kemampuan pemerintah federal dan daerah, seperti kabupaten dan kota, untuk mendukung pengembangan desa (Jauhariah & Syamsudin, 2023).

Di Kabupaten Bogor, salah satu program prioritas yang dijalankan pada masa kepemimpinan Ade Yasin dan Iwan Setiawan adalah Satu Miliar Satu Desa (Samisade). Program ini dirancang untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pedesaan yang menunjang sektor pariwisata, perekonomian, kesehatan, dan pendidikan, sekaligus membuka akses yang lebih baik menuju wilayah perbatasan desa maupun pusat pemerintahan. Sumber pendanaan program ini berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) serta Dana Desa (DD) (Gina Fitria Prihatin et al., 2024).

Metode Bogor membangun, yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan pendekatan kooperatif, menjadi dasar pelaksanaan program Samisade. Metode ini bertujuan untuk mendukung ekonomi lokal dan mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat desa. Salah satu SDGs tersebut adalah meningkatkan akses ke pusat pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan.

2.5.4 Evaluasi Program

Evaluasi program dapat dipahami sebagai metode terstruktur yang digunakan untuk mengumpulkan,

menganalisis, dan memanfaatkan informasi guna menjawab pertanyaan utama mengenai suatu program. Selain itu, menurut Cornbach dalam (Diana et al., 2023), evaluasi program juga merupakan upaya menyediakan informasi yang berguna bagi pengambil keputusan. Senada dengan pendapat Wirawan dalam (Sintiawati et al., 2018), evaluasi program juga dipandang sebagai proses sistematis dalam menghimpun, mengolah, menelaah, dan menyajikan data agar dapat menjadi masukan dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, ada pula pandangan yang menyebutkan bahwa evaluasi program adalah kegiatan pengumpulan informasi secara teratur mengenai pelaksanaan program, dampak yang ditimbulkan, maupun untuk menjawab persoalan-persoalan tertentu yang relevan.

Secara umum, evaluasi program dapat dirumuskan sebagai proses untuk menggambarkan sekaligus menilai jalannya sebuah program. Tujuannya adalah menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Dengan demikian, evaluator memiliki acuan yang jelas untuk menilai setiap komponen program, apakah telah sesuai dengan ketentuan atau justru menyimpang..

1. Fungsi/ Kegunaan Evaluasi

Evaluasi dapat dipahami sebagai suatu Penilaian yang tidak terbatas pada capaian akhir, tetapi juga mencakup jalannya pelaksanaan, tingkat efektivitas dan efisiensi, serta dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

William N. Dunn dalam Meirgin Yektris Killa et al. (2021) menjelaskan bahwa evaluasi merupakan upaya menghasilkan sekaligus menyajikan informasi yang relevan mengenai nilai atau manfaat kebijakan kepada pihak

pengambil keputusan. Evaluasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta apakah perlu dilanjutkan, diperbaiki, atau bahkan dihentikan. Evaluasi memiliki beberapa fungsi penting dalam konteks kebijakan publik maupun program pembangunan, antara lain:

a Fungsi Kontrol

Evaluasi berfungsi sebagai alat untuk mengawasi jalannya pelaksanaan kebijakan agar tetap sesuai dengan perencanaan. Dengan evaluasi, penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan dapat diidentifikasi dan diperbaiki lebih dini.

b Fungsi Akuntabilitas

Evaluasi menjadi sarana untuk bertanggungjawab terhadap anggaran, sumber daya, dan hasil program kepada publik, orang terkait, dan lembaga pengawas. Evaluasi membantu membuktikan bahwa anggaran yang digunakan memberikan manfaat nyata.

c Fungsi Pembelajaran

Evaluasi memberikan pembelajaran bagi pembuat kebijakan dan pelaksana program. Hasil evaluasi menjadi masukan untuk memperbaiki desain, strategi, dan implementasi program di masa depan.

d Fungsi Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, baik untuk melanjutkan, menghentikan, memperluas,

atau mengubah arah suatu program atau kebijakan.

e Fungsi Perbaikan

Evaluasi memungkinkan identifikasi terhadap kelemahan dan kekuatan suatu program, sehingga dapat dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan atau perumusan kebijakan baru yang lebih tepat sasaran.

2.6 Model-Model Evaluasi

Model evaluasi terdiri dari beberapa model untuk pedoman kerja, yaitu :

1 Model Evaluasi CIPP

Model ini dirancang dengan fokus pada pengambilan keputusan. Evaluasi konteks (Context Evaluation) berperan dalam mendukung perencanaan keputusan dengan menekankan identifikasi kebutuhan yang ingin dicapai oleh suatu program sekaligus menetapkan tujuan yang harus diwujudkan. Secara keseluruhan, evaluasi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai latar belakang program yang dikaji, serta menilai kebutuhan dan menentukan sasaran yang akan dicapai. Analisis ini berfokus pada kondisi lingkungan dan dilakukan dengan cara mengidentifikasi untuk menggambarkan secara rinci target program yang akan dicapai, serta merancang langkah-langkah untuk mengurangi perbedaan antara kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan.

Evaluasi input (Input Evaluation) digunakan untuk menilai kesesuaian dan kecukupan sumber daya, sekaligus mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan. Evaluasi ini membantu merancang strategi dan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta menentukan sumber daya yang tersedia dan memilih alternatif paling tepat

serta rencana yang disiapkan sebelum pelaksanaan program prosedur kerja yang diterapkan dalam pencapaian sasaran. Dalam praktiknya, evaluasi ini sering diterapkan pada tahap pelaksanaan program melalui penjadwalan dan prosedur operasional.

Evaluasi proses (Process Evaluation) berperan dalam mendukung implementasi keputusan. Evaluasi proses berfungsi untuk menilai sejauh mana rencana telah dijalankan, menentukan apakah revisi diperlukan, serta memungkinkan pemantauan, pengendalian, dan perbaikan prosedur pelaksanaan program. Selain itu, evaluasi ini juga menyediakan informasi umpan balik mengenai implementasi keputusan, memastikan bahwa setiap tindakan dan rencana program dilaksanakan.

Evaluasi produk berperan dalam mendukung pengambilan keputusan selanjutnya (recycling decision). Dalam evaluasi produk, dilakukan penentuan dan penilaian terhadap hasil atau keluaran program untuk memastikan tujuan yang telah ditetapkan tercapai secara efektif terhadap dampak program secara umum maupun khusus, termasuk mengukur dampak yang telah diperkirakan sebelumnya dan mengidentifikasi dampak yang tidak terantisipasi. Selain itu, evaluasi produk juga menilai manfaat program serta mengukur tingkat efektivitas pelaksanaannya. Jenis evaluasi ini digunakan untuk memberikan masukan bagi perbaikan atau pengembangan program selanjutnya :

- a Evaluasi produk membantu pengambilan keputusan berikutnya dengan menilai sejauh mana hasil program telah tercapai serta menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan setelah kegiatan selesai.
- b Evaluasi ini juga berfungsi untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam program.

Model CIPP menyediakan kerangka evaluasi yang sistematis dan komprehensif untuk meningkatkan kualitas program secara berkelanjutan. Evaluasi produk menilai hasil akhir program dan menjadi dasar bagi pengambilan keputusan berikutnya. Evaluasi proses memastikan bahwa seluruh kegiatan berlangsung sesuai prosedur dan jadwal, sekaligus memberikan umpan balik untuk perbaikan. Sementara itu, evaluasi input berfokus pada penilaian sumber daya, alternatif strategi, dan rencana operasional guna mendukung pengambilan keputusan sebelum pelaksanaan. Sedangkan evaluasi konteks menitikberatkan pada identifikasi kebutuhan serta penetapan tujuan program.

2 Model Evaluasi UCLA

Model ini membantu menentukan alternatif tindakan yang dapat diambil. Alkin menjelaskan bahwa dalam model UCLA terdapat lima jenis evaluasi dalam model UCLA:

- a. System Assessment: Evaluasi ini bertujuan memberikan gambaran tentang kondisi atau profil sistem/program saat ini, sehingga memudahkan pemahaman terhadap posisi dan keadaan keseluruhan program.
- b. Program Planning: Evaluasi ini mendukung proses pemilihan program yang dianggap paling potensial untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- c. Program Implementation: Evaluasi ini menilai apakah program telah dijalankan sesuai perencanaan dan tepat sasaran pada kelompok yang dituju.
- d. Program improvement, memberikan informasi tentang kinerja, pelaksanaan, apakah sesuai tujuan, serta mengidentifikasi masalah baru atau hal-hal yang tak terduga.

Dengan demikian, model evaluasi UCLA menyediakan panduan sistematis bagi pengambil keputusan untuk menilai, merencanakan, dan meningkatkan efektivitas program. Program

Improvement digunakan untuk memberikan informasi mengenai cara pemanfaatan program bagi pemangku kepentingan.

Model Evaluasi Brinkerhoff terdiri dari tiga jenis desain evaluasi:

a. Fixed Vs Emergent Evaluation Design

Desain ini berdasarkan tujuan program, termasuk perencanaan analisis yang dilakukan sebelumnya. Informasi yang dikumpulkan dirancang sesuai dengan tujuan program. Desain emergent berbeda dengan desain fixed karena dirancang untuk menyesuaikan diri dengan fenomena yang sedang berlangsung dan memengaruhi program, seperti adanya masukan atau informasi baru. Desain ini bersifat fleksibel dan dapat berkembang sesuai kebutuhan dan kondisi program.

b. Formative vs Summative Evaluation

Evaluasi sumatif difokuskan pada penilaian kegunaan program secara keseluruhan, dengan menekankan variabel-variabel yang dianggap penting dan relevan untuk pengambilan keputusan. Sebaliknya, evaluasi formatif bertujuan mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk revisi atau perbaikan program.

c. Experimental Design dan Natural Inquiry

Metode Natural Inquiry dilakukan dengan evaluator langsung terjun untuk mengumpulkan informasi dari sumber serta mengamati program secara nyata. Sementara itu, Desain Eksperimental dan Quasi-Eksperimental diadopsi dari pendekatan penelitian untuk menilai program yang baru diuji coba.

Dengan demikian, model evaluasi Brinkerhoff menawarkan berbagai pendekatan yang dapat disesuaikan dengan tujuan, konteks, dan kebutuhan evaluasi program.

3 Model Evaluasi Stake

Stake dalam Josua et al. (2025) mengembangkan model evaluasi ini yang memberikan dampak penting dalam bidang evaluasi. Walaupun tampak sederhana, model ini memiliki landasan konseptual yang kuat sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut. Menurut Stake, evaluasi harus menekankan dua hal pokok, yakni deskripsi (description) dan penilaian (judgement), sekaligus membagi proses evaluasi program pendidikan menjadi tiga tahap: antecedents (input), transactions (proses), dan outcomes (output).

Tahap antecedents berfokus pada kondisi awal sebelum dan selama pelaksanaan instruksi, serta hubungannya dengan hasil yang diharapkan. Sementara itu, tahap transactions menyoroti jalannya proses instruksi, di mana hasil yang muncul merupakan konsekuensi. Tahap selanjutnya kemudian menilai pencapaian yang diperoleh diterapkan, yang menjadi dasar untuk menentukan langkah tindak lanjut.

Salah satu aspek penting dari model ini adalah peran evaluator dalam menilai program secara objektif. Stake menekankan bahwa deskripsi tidak sama dengan penilaian. Informasi yang diperoleh dari ketiga tahap antecedents, transactions, dan outcomes tidak hanya digunakan untuk membandingkan antara tujuan dan realisasi, tetapi juga dievaluasi terhadap standar absolut untuk menilai sejauh mana program berhasil memberikan manfaat.